

2025



RENJA-P

RENCANA KERJA

PERUBAHAN 2025

KANTOR CAMAT BATANGHARI LEKO
KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
Jl. Raya Tanah Abang Dusun I No.01 Telp/Fax: (0714) 7340001
Email : batangharileko12017@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO
NOMOR : 36/KPTS/KEC.BHL/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN BATANGHARI LEKO
TAHUN 2025

CAMAT BATANGHARI LEKO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan pasal 5 ayat (2) , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020. maka Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko selaku OPD menyusun Renja-OPD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batanghari Leko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

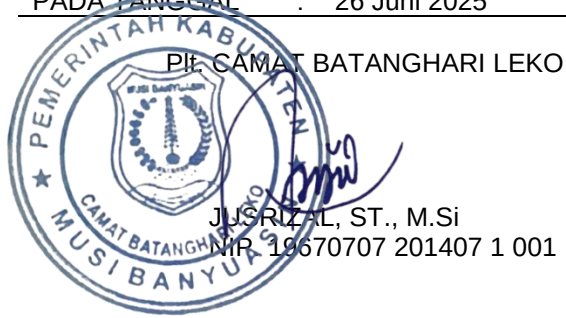
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Surat Edaran Bupati Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Muba tahun 2023-2026;
23. Peraturan Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tanah Abang
PADA TANGGAL : 26 Juni 2025



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin;
3. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
Jl. Raya Tanah Abang Dusun I No.01 Telp/Fax: (0714) 7340001,
email : batangharileko12017@gmail.com

CAMAT BATANGHARI LEKO

NOMOR : 37/KPTS/KEC.BHL/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
PEMERINTAH KECAMATAN BATANGHARI LEKO TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BATANGHARI LEKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan pasal 5 ayat (2) , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020. maka Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko selaku OPD menyusun Renja-OPD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batanghari Leko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

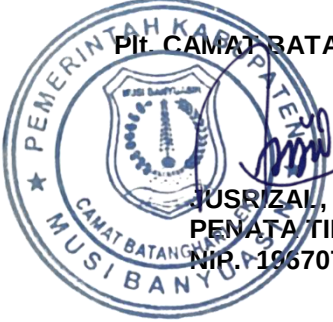
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Surat Edaran Bupati Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Muba tahun 2023-2026;
23. Peraturan Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko 2025.
- KEDUA : Tim tersebut pada ketetapan pertama keputusan ini bertanggung jawab atas pengkajian hingga penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dipandang perlu akan diubah seperlunya

DITETAPKAN DI : Tanah Abang
PADA TANGGAL : 26 Juni 2025

Pt. CAMAT BATANGHARI LEKO,

JUSRIZAL, ST., M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19670707 201407 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin;
3. Arsip;

Lampiran Surat Keputusan Camat Batanghari Leko
Nomor : 37/KPTS/KEC.BHL/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO 2025

JABATAN DALAM TIM	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM INSTANSI
Ketua Tim	Ahmad Saropi, S.Sos.I 198210012010011019	Plt. Camat Batanghari Leko
Sekretaris	Andri Irawan, S.IP 197307112006041011	Kasi PPD/K
Anggota	Akhsin Ubaidillah, S.Sos 197003312002121003	Kasi Pemerintahan
Anggota	Nurjanah, SE 197002282009062001	Plt. Kasi Pelayanan Umum
Anggota	Susparita, SE 197301132007012006	Plt. Kasi Kesejahteraan Sosial
Anggota	Sudarni 198007102008012006	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Anggota	Jefri Andriyansyah, A.Md 19970430 202012 1 001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

DITETAPKAN DI : Tanah Abang
PADA TANGGAL : 26 Juni 2025

Plt. CAMAT BATANGHARI LEKO,

JUSRIZAL, ST., M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19670707 201407 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat- Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Perencanaan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2023 – 2026.

Substansi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batanghari Leko pada Tahun 2025.



Pt. CAMAT BATANGHARI LEKO

JUSRIZAL, ST., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19670707 201407 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kec. Batanghari Leko	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Batanghari Leko.....	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kec. Batanghari Leko.....	22
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Kec. Batanghari Leko	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Kec. Batanghari Leko	32
3.3. Program dan Kegiatan SKPD	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. BATANGHARI LEKO	41
BAB V PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin, Dokumen Perencanaan (DOKREN) Kecamatan Batanghari Leko 2023-2026, di dalamnya menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 dan rencana kerja perubahan pada tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Batanghari Leko Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja Kecamatan Batanghari Leko, selaras dengan Renstra Kerja Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Batanghari Leko tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 023 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1).
 22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2025;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. BATANGHARI LEKO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kec. Batanghari Leko.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Dokren Kecamatan Batanghari Leko, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Dokren dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Batanghari Leko sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Dokren Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2023-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun Kedua pelaksanaan Dokren Kecamatan Batanghari Leko 2023-2026 dapat diketahui. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Program Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp. 3.610.526.224,00,- Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.362.750.594,00,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 37.74%.

Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan sudah memenuhi target Rencana Kerja Operasional Triwulan II. Tingkat realisasi program kegiatan tahun 2025 serta triwulan II tahun 2025 kecamatan Batanghari Leko dapat dilihat pada table berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO TAHUN ANGGARAN 2025
S/D TRIWULAN II

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN	
		REALISASI	
		Rp.	%
Kecamatan Batanghari Leko	3.610.526.224,00	1.362.750.594,00	37,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.129.682.224,00	1.308.392.594,00	41,81
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.156.000,00	75.000,00	1,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000,00	73.000,00	5,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.906.000,00	2.000,00	0,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.353.370.536,00	1.007.340.304,00	42,8
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.353.370.536,00	1.007.340.304,00	42,8
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.623.000,00	21.998.000,00	47,18
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	340.000,00	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.283.000,00	21.998.000,00	47,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.110.521,00	59.536.200,00	26,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.230.500,00	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.892.371,00	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	9.495.200,00	47,48

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.150,00	5.811.000,00	29,06
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.493.000,00	4.950.000,00	28,3
Penyediaan Bahan/Material	32.500.000,00	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000,00	6.240.000,00	24,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.006.000,00	33.040.000,00	66,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.890.000,00	0	0
Pengadaan Mebel	26.890.000,00	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.002.167,00	159.775.090,00	58,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.429.500,00	25.070.290,00	31,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.572.667,00	134.704.800,00	69,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.530.000,00	59.668.000,00	30,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.000.000,00	52.568.000,00	41,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.930.000,00	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	7.100.000,00	45,51
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.942.000,00	42.658.000,00	9,36
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	42.658.000,00	9,5

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	449.177.000,00	42.658.000,00	9,5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.265.000,00	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.265.000,00	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.500.000,00	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.500.000,00	0	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.206.000,00	3.500.000,00	48,57
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.206.000,00	3.500.000,00	48,57
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.206.000,00	3.500.000,00	48,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.856.000,00	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.856.000,00	0	0
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.856.000,00	0	0

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.840.000,00	8.200.000,00	69,26
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.840.000,00	8.200.000,00	69,26
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.600.000,00	0	0
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.240.000,00	8.200.000,00	99,51

Tabel.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Dokren Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batanghari Leko

Lembar: 13 Lembar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Traget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

		baik								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
		Tersedianya dokumen renstra, renja dan tapkin	-	5 dokumen	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	0	9 laporan	9 laporan	0	9 laporan	9 laporan	9 laporan
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9 laporan	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /Bulan	-	16 Orang /Bulan	16 Orang /Bulan	-	16 Orang /Bulan	16 Orang /Bulan	16 Orang /Bulan
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	12 Bulan	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi	Persentase pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Kepegawaian Perangkat Daerah	kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	-	2 orang	2 orang	-	2 orang	2 orang	2 orang
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	2 Orang	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket
		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor kecamatan	-	17 Jenis	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Terpenuhinya barang cetak kantor kecamatan terpenuhinya penggandaan kantor kecamatan	-	4935 Lembar	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket

		Terpenuhinya sarana listrik dan peralatan listrik yang dibutuhkan kecamatan	-	6 Jenis	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket
		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan	-	6 Unit	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket
		Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kelurahan dan kecamatan	-	20 Jenis	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276 Dokumen	-	276 Dokumen	276 Dokumen	-	276 Dokumen	276 Dokumen	276 Dokumen
		Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang-undangan	-	2000 Eksemplar	-	-	100%	-	-	-
7.01.03.2.01.03	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan/Material	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	-	48 Laporan	48 Laporan	-	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan
		Tersedianya kebutuhan	-	12 Bulan	-	-	100%	-	-	-

		makanan dan minuman tamu								
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	12 Bulan 12 Bulan	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	-	6 unit	6 unit	-	6 unit	6 unit	6 unit
		Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor	-	6 unit	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan
		Tersedianya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan operator aplikasi	-	18 Orang	-	-	100%	-	-	-

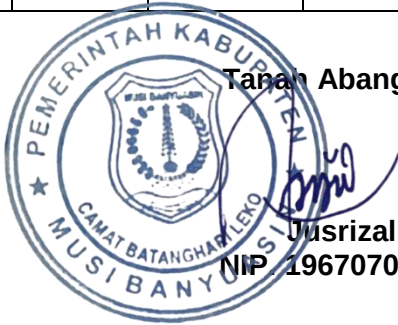
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	-	36 Laporan	36 Laporan	-	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan
		Terpenuhinya kebutuhan pembayaran air, listrik, telpon dan internet kecamatan	-	12 Bulan	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Terpenuhinya bayar pajak kendaraan dinas kecamatan	-	4 Unit 4 Unit	-	-	100%	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	13 unit	-	13 unit	13 unit	-	13 unit	13 unit	13 unit

		Dipelihara/Direhabilitasi								
		Jumlah peralatan gedung kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik	-	13 unit	-	-	100%	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		Fasilitas kunjungan kerja kepala dan wakil kepala daerah Fasilitas pendukung kegiatan kabupaten di kecamatan	-	6 Kegiatan 2 Kali	-	-	100%	-	-	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

	Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Terselenggaranya pelayanan PATEN	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kec. Batanghari Leko	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
7.01.04.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Batanghari Leko	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	16 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan

	Kepolisian Republik Indonesia	PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
		Fasilitasi Penegakan PERDA	-	-	-	-	100%	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	300 Orang
		Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	100%	-	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang dibina	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.17	Fasilitasi Penataan,	Jumlah Dokumen Fasilitasi	16 Dokumen	-	16	16	100%	16	16	16

	Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan batas Desa	dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen
		Fasilitasi batas Desa / Wilayah Fasilitasi TORA	-	-	-	-	100%	-	-	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan
		Persentase Jumlah Desa yang di Bina	-	-	-	-	100%	-	-	-



Tapan Abang, 26 Juni 2025

Jusrizal, ST., M.Si
NIP. 19670707 201407 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari Leko

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batanghari Leko dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya fasilitas Kegiatan Kabupaten
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran
- Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Batanghari Leko meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum adanya SPM Kecamatan Batanghari Leko
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Musi Banyuasin
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah

dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Kecamatan Batanghari Leko dalam menyusun program kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Batanghari Leko terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batanghari Leko
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang dibina	-	-	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	
3.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	
4.	Persentase Penegakan Perda			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batanghari Leko bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kurang lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima terhadap Pemerintah Kecamatan
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kurang Tertibnya Administrasi Kependudukan
6. Makin rendahnya minat masyarakat akan keragaman Budaya
7. Makin sulitnya biaya hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin
8. Kurang tanggapnya masyarakat akan daerah rawan bencana alam

Dari isu-isu strategis diatas, maka masalah-masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur
3. Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
4. Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan
5. Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan
6. Minat masyarakat akan keragaman budaya
7. Perhatian Pemerintah terhadap Masyarakat Miskin
8. Ketanggapan daerah rawan bencana alam

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko yaitu :

1. Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terjaminnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan prima Pemerintah Kecamatan
4. Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan
5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan administrasi kependudukan
6. Meningkatnya minat masyarakat akan keragaman budaya
7. Meringankan beban hidup masyarakat
8. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat bencana alam

Dari analisis kondisi lingkungan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko pula dapat menentukan proyeksi kedepan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko agar tercapainya tujuan pemerintah Kecamatan Batanghari Leko yaitu :

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Batanghari Leko
3. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Batanghari Leko.
4. Tercapainya Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan
5. Tercapainya Kesadaran Masyarakat akan administrasi kependudukan
6. Tercapainya minat masyarakat akan keragaman budaya
7. Terwujudnya Usaha Kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan yang kuat.
8. Tanggap dalam menghadapi konflik masyarakat dan bencana alam

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2026 yang memuat

- a) rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) program prioritas pembangunan daerah dan
- c) rencana kerja,

Rancangan awal Renja Kecamatan Batanghari Leko dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Batanghari Leko

Lembar : 8 Lembar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Jutaan Rp)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Jutaan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	3.452.339.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	3.452.339.500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	106,989,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	106,989,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	60,998,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	60,998,000	
	Koordinasi dan	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian	9 laporan	45,991,000	Koordinasi dan	Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian	9 laporan	45,991,000	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batanghari Leko	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batanghari Leko	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batanghari Leko	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	2,500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batanghari Leko	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	2,500.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batanghari Leko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,500,,000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /Bulan	2,500,,000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam/luar Kab. Musi Banyuasin	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	89,920,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam/luar Kab. Musi Banyuasin	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	89,920,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	40,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	40,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam/luar Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	49,920,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam/luar Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	49,920,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100%	520,962,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100%	520,962,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Lembar	80,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	80,000,000	

								yang Disediakan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	6,100,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6,100,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Eksemplar	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276 Dokumen	10,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	100,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	100,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan/Material	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan/Material	48 Laporan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	249,862,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249,862,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	140,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	140,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kecamatan Batanghari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	3 Unit	20,000,000	Pengadaan Kendaraan	Kecamatan Batanghari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0 Unit	20,000,000	

	Lapangan	Leko	Lapangan yang Disediakan			Dinas Operasional atau Lapangan	Leko	Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	340,243,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	340,243,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	50,243,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	50,243,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	290,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	290,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	154,298,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	154,298,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	38,954,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	38,954,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	24,598,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	24,598,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	404,577,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	404,577,000	

						Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batanghari Leko	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	354,577,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batanghari Leko	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 %	354,577,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	354,577,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	354,577,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	50,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	50,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	50,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	50,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kali 6 Kegiatan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	- Fasilitasi Pendukung Kegiatan Kabupaten di Kecamatan - Fasilitasi Kunjungan Kerja Kepala dan wakil kepala daerah	6 kegiatan 2 kali	50,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100%	50,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	12 Bulan	50,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kecamatan Batanghari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Bulan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas	Kecamatan Batanghari	Terselenggaranya Pelayanan PATEN	12 Bulan	50,000,000	

	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Leko	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Leko				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kec. Batanghari Leko	100%	2.000.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kec. Batanghari Leko	100%	2.000.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	2.000.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	2.000.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batanghari Leko	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.000.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Batanghari Leko	100%	50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	50,000,000	
	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA	100%	50,000,000	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	50,000,000	

	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	50,000,000	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	50,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %	70,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	70,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	70,000,000	
	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan	Kecamatan Batanghari Leko	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	20,000,000	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas keamanan	Kecamatan Batanghari Leko	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	20,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100%	50,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100%	50,000,000	

	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Jumlah Desa yang dibina	100%	20.000.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Persentase Jumlah Desa yang dibina	100%	15.206.100	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan batas Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	20.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan batas Desa	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Dokumen	4.500.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	10.706.100	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Batanghari Leko	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	10.706.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN
TAHUN 2024 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan BATANGHARI LEKO

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Jirak Jaya dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan,
- dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Batanghari Leko mempunyai *tujuan* : Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Kecamatan dan Meningkatnya kinerja aparatur di tingkat Kecamatan dengan *sasaran* *Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Meningkatkan pelayanan distribusi beras untuk Keluarga miskin yang tepat sasaran, terfasilitasinya kegiatan kabupaten, Meningkatkan kualitas kinerja Aparatur di Tingkat Kecamatan, Meningkatkan kualitas sarana dan Prasarana Aparatur, dan Meningkatkan kualitas Aparatur.*

3.3. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Batanghari Leko maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Perberdayaan Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komoniksi sumberdaya air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- h. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- K. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- L. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- M. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- N. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- O. Fasilitasi, Rekomendasi, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Fasilitasi Penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
 - Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Lokasi
						Keluaran	Target							
							Penetapan APBD (Induk)	Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Penetapan APBD (Induk)	Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	+/-	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.258.838.954	3.129.682.224	3.346.412.193	216.729.969	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000	7.156.000	7.156.000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	1.250.000	1.250.000	0	Kecamatan Batanghari Leko

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	15.000.000	5.906.000	5.906.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.291.490.536	2.353.370.536	2.500.700.506	147.329.970	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.291.490.536	2.353.370.536	2.500.700.506	147.329.970	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2.05		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.269.000	46.623.000	46.623.000	0	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.328.000	340.000	340.000	0	Kecamatan Batanghari Leko

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	47.941.000	46.283.000	46.283.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					352.528.585	226.110.521	226.110.521	0	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.275.500	14.230.500	14.230.500	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	78.267.285	46.892.371	46.892.371	0	Kecamatan Batanghari Leko

7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	19.999.500	19.999.500	19.999.500	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	39.998.300	19.999.150	19.999.150	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	34.986.000	17.493.000	17.493.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000	32.500.000	32.500.000	0	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	24.990.000	24.990.000	24.990.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.012.000	50.006.000	50.006.000	0	Kecamatan Batanghari Leko

7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					44.930.000	26.890.000	26.890.000	0	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	44.930.000	26.890.000	26.890.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					282.750.833	272.002.167	331.402.166	59.399.999	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	79.429.500	79.429.500	79.429.500	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	203.321.333	192.572.667	251.972.666	59.399.999	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.870.000	197.530.000	207.530.000	10.000.000	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	126.000.000	126.000.000	136.000.000	10.000.000	Kecamatan Batanghari Leko

					Lapangan	Perizinannya								
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	56.270.000	55.930.000	55.930.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					533.384.000	455.942.000	455.942.000	0	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					519.854.000	449.177.000	449.177.000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	519.854.000	449.177.000	449.177.000	0	Kecamatan Batanghari Leko

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan					8.530.000	4.265.000	4.265.000	0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.530.000	4.265.000	4.265.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	0	0	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	0	0	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					14.412.000	7.206.000	7.206.000	0	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					14.412.000	7.206.000	7.206.000	0	

7	01	04	2.02	01	Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	14.412.000	7.206.000	7.206.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					11.712.000	5.856.000	5.856.000	0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					11.712.000	5.856.000	5.856.000	0	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	300 Orang	11.712.000	5.856.000	5.856.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.492.000	11.840.000	11.840.000	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					20.492.000	11.840.000	11.840.000	0	

7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	7.200.000	3.600.000	3.600.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
7	01	06	2.01	17	Koordinas Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	13.292.000	8.240.000	8.240.000	0	Kecamatan Batanghari Leko
										3.838.838.954	3.610.526.224	3.827.256.193	216.729.969	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran induk sebesar Rp. 3.258.838.954,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 3.346.412.193,- meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran Induk Sebesar Rp.25.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 7.156.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran Induk Rp. 10.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Anggaran Induk Rp. 15.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.906.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Anggaran Induk Sebesar Rp. 2.291.490.536,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.700.506,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Anggaran Induk Rp. 2.291.490.536,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.700.506,-
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 64.269.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 46.623.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Anggaran Induk Rp. 16.328.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 340.000,-
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi , dengan Anggaran Induk Rp. 47.941.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 46.283.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 352.528.585,- dan setelah perubahan Rp. 226.110.521,- meliputi Sub Kegiatan berikut:
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Anggaran Sebesar Rp. 14.275.500,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 14.230.500,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Angaran Sebesar Rp. 78.267.285,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 46.892.371,-
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Anggaran Sebesar Rp. 19.999.500,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran Sebesar Rp. 39.998.300,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 19.999.150,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Anggaran Sebesar Rp. 34.986.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 17.493.000,-
 - Penyediaan Bahan/Material Sebesar 40.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 32.500.000,-
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, Anggaran Sebesar Rp. 24.990.000,-
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran Sebesar Rp. 100.012.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 50.006.000,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 44.930.000,- meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Mebel, Anggaran Sebesar Rp. 44.930.000,-
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 282.750.833,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 331.402.166,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran Sebesar Rp. 79.429.500,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 79.429.500,-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran Sebesar Rp. 203.321.333,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 251.972.666,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 197.870.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 207.530.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 126.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 136.000.000,-
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 56.270.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 55.930.000,-
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 15.600.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Anggaran Sebesar Rp. 533.384.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 455.942.000,- meliputi kegiatan berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 519.854.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 449.177.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 519.854.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 449.177.000,-
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 8.530.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 4.265.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 8.530.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 4.265.000,-
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.500.000,-

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Anggaran Sebesar Rp. 14.412.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 7.206.000,- Meliputi Kegiatan :

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 14.412.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 7.206.000,- Meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Sebesar Rp. 14.412.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 7.206.000,-

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Anggaran Sebesar Rp. 11.712.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 5.856.000,- Meliputi Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Anggaran Sebesar Rp. 11.712.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 5.856.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan Anggaran Sebesar Rp. 11.712.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 5.856.000,-

5. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 20.492.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 11.840.000,- Meliputi Kegiatan :

- a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 20.492.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 11.840.000,- meliputi Sub Kegiatan berikut :
 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan Anggaran Sebesar Rp. 7.200.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 3.600.000,-
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan Anggaran sebesar Rp. 13.292.000,- dan Setelah Perubahan Sebesar Rp.8.240.000,-

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Batanghari Leko dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Batanghari Leko.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Batanghari Leko. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Batanghari Leko ini dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 atau tahun keempat, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

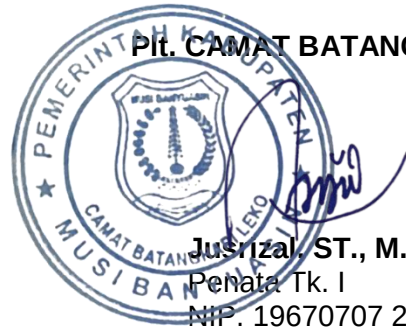
- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh

aparatus dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Amien.

PIL. CAMAT BATANGHARI LEKO,



Jusrizal, ST., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19670707 201407 1 001